

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah di kawasan Asia Pasifik yang mengalami berbagai kasus perbatasan maritim. Laut Tiongkok Selatan ini juga merupakan laut terbesar dari Samudera Pasifik yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis dan juga sebagai laut yang memiliki berbagai sumber daya yang sangat berpotensi di dunia. Dapat dilihat bahwa sumber daya di Laut Tiongkok Selatan ini terdapat 213 *billion barrels* minyak bumi dan gas alam.¹

Laut Tiongkok Selatan ini memiliki nilai strategis karena dilihat sebagai rute pengiriman terpendek antara India dan Samudera Pasifik dan jalur komunikasi laut yang melewati Laut Tiongkok Selatan yang membawa hampir sepertiga dari perdagangan dunia dan setengah dari pengiriman minyak dan gas alam. Melihat banyaknya keuntungan di Laut Tiongkok Selatan, muncul konflik antar negara untuk saling mengklaim Laut Tiongkok Selatan sebagai teritorialnya. Laut Tiongkok Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi dan gas alam serta sebagai jalur pelayaran strategis bagi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Bahkan invansi militer juga dilakukan oleh negara-negara yang berkonflik untuk mendapatkan kedaulatan.²

Kasus-kasus yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan ini sejak abad 20 ketika adanya klaim kepulauan Paracel dan Spratly. Tiongkok mengklaim Laut Tiongkok Selatan secara pihak luas wilayah yang terletak dalam penarikan dari

¹Dancel, Raul. "Hearing on South China Sea Spat Begins." *The Straits Times*. The Straits Times, 10 Juni 2018. Web

²EIA (2013), South China Sea, Available at <http://www.eia.gov/countries/regionsttopics.cfm?fips=scs>

Garis U sebagai wilayah dan perairannya sendiri, sedangkan Vietnam mengklaim kedaulatan atas kepulauan Paracel dan Spartly, ZEE dan landas kontinen yang mengelilingi garis pantainya.³

Dalam peta konflik di wilayah Laut Tiongkok Selatan dibagi atas dua, yang pertama, wilayah kepulauan Paracel yang terletak di bagian Utara Laut Tiongkok Selatan, di dalam konflik ini melibatkan Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam yang sama-sama mengklaim kepemilikan atas kepulauan tersebut. Kedua, konflik yang melibatkan Tiongkok dengan negara ASEAN yakni, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan juga Malaysia yang memperebutkan kepulauan Spartly pada bagian selatan Wilayah Laut Tiongkok Selatan.⁴

Banyaknya negara yang melakukan klaim terhadap Laut Tiongkok dikarenakan melihat dari letak strategis, secara geografis Laut Tiongkok Selatan dikelilingi oleh sepuluh negara pantai (Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina). Kedua dikarenakan ekonomi dan pentingnya geopolitik termasuk kandungan alam yang ada didalamnya seperti sumber daya minyak dan juga ikan.⁵

Melihat banyaknya negara yang mengklaim kepulauan Paracel dan Spartly hal tersebut menimbulkan kecemasan bagi Vietnam, bagi Vietnam hal tersebut adalah sebuah ancaman, terutama bagian ekonomi karena sumber daya alam yang ada di Laut Tiongkok Selatan. Vietnam kemudian melakukan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat terkait Laut Tiongkok Selatan. Dilihat dari

³Glazer, Bonnie S. "Armed Clash in the South China Sea." *Council on Foreign Relations*. Council on Foreign Relations, Apr. 2013. Web.10 juni. 2018.

⁴ I gede Made Dwi Jaya, "Kepentingan Vietnam dalam Konflik Laut China Selatan" E-Journal <http://www.e-jurnal.com/2016/05/kepentingan-vietnam-dalam-konflik-laut.html> (diakses pada hari Senin, 21 Juni 2018)

⁵Kementerian Luar Negeri, "Laut Cina Selatan", <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Laut-China-Selatan.aspx> (diakses pada tanggal, 10 Juni 2018)

letak geografis Vietnam mempunyai lokasi yang tepat berada di sebelah Laut Tiongkok Selatan yang merupakan perairan strategis berbatasan langsung dengan Asia Tenggara. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi Amerika Serikat dengan kebijakan *Pivot to Asia*.⁶

Pada September 2011, Amerika Serikat dan Vietnam mengumumkan minat untuk kerjasama lebih kuat dalam bidang pertahanan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Leon Panetta, melakukan kesepakatan kerjasama lebih erat dibidang pertahanan dengan Menteri Pertahanan Vietnam Hung Quang Thanh.⁷ Panetta juga mengunjungi pelabuhan Cam Ranh Bay, tempat bekas markas militer Amerika Serikat pada saat perang Vietnam. Dalam kerjasama ini Amerika Serikat memiliki tujuan untuk memelihara keamanan regional dan membangun ketertiban regional di kawasan Laut Tiongkok Selatan, dan berfokus pada upaya campur tangan Tiongkok yang secara sepihak ingin menguasai dikawasan Laut Tiongkok Selatan.⁸

Amerika Serikat juga memiliki kepentingan di kepulauan Paracel dan Sparty, dimana Amerika Serikat ingin menjaga keamanan Perdamaian dan kestabilan kawasan di Asia Tenggara. Melihat adanya peningkatan militer Tiongkok tersebut Amerika Serikat merasa terancam, karena hal tersebut bisa mengancam berjalannya *Pivot to Asia*.⁹

⁶Joshua Kurlantzick. *"The Pivot in Souteast Asia Balancing Interst and Values"*. Council on Foreign Relations". January 2015.

⁷Chalkey, Adam L. "An engaged Vietnam". Developing A U.S Pacific Command Solution. Naval war Collage.2013

⁸Haluan Media. 2011. Cina Meradang , AS-Vietnam latihan Tempur. Haluan. Tersedia di <http://www.eastasiaforum.org/2013/08/06/the-us-vietnam-comprehensive-partnership-key-issues-andimplications/>Diunduh pada tanggal 10 Juni 2018.

⁹Wiarda,H.J. *"American Foreign Policy in Regions of Conflict: A Global perspective"*.New York: Palgrave Macmilan. (2011)

Dalam menangani Permasalahan Laut Tiongkok Selatan, Amerika Serikat melangsungkan diplomasinya ke Vietnam melalui *Pivot to Asia*. Sejak dimulainya masa jabatan pertama Presiden Barack Obama, Amerika Serikat ini telah mengejar kembali hubungannya dengan Asia Tenggara. Pada tahun 2011 fokus regional ini telah menjadi bagian dari strategi yang lebih luas ke arah Asia yang disebut “*Pivot*”, atau penyeimbangan kembali. Adanya tiga dimensi utama dari *Pivot* ini yaitu militer, ekonomi, dan juga politik. Kebijakan *Pivot* yang di bentuk oleh Barack Obama ini mulai meluas, dimana Barack Obama melibatkan Asia Tenggara dalam kebijakannya dilihat dari dia melakukan perjalanan ke negara-negara Asia untuk menyampaikan adanya kebijakan *Pivot*.¹⁰

Barack Obama memulai perjalanannya ke negara-negara Asia pada November 2011, Obama menyatakan di dalam Pidato di depan Parlemen Australia bahwa “*as a Pacific nation, the United States will play a larger and Long-term role in shaping the region*”.¹¹ Obama juga mengumumkan langkah konkrit pertama mengenai *Pivot* yaitu penempatan rotasi marinir AS di Darwin. Pada 19 November 2011, Obama menjadi presiden AS pertama yang berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi *East Asia Summit* (KTT EAS) di Bali, Indonesia. Obama juga bergabung dengan para pemimpin delapan negara Asia-Pasifik lainnya pada KTT Asia Pacific Economy (APEC) untuk

¹⁰DOD (2014) —*Quadrennial Defense Review 2014*], available at: http://www.defense.gov/pubs/2014_Quadrennial_Defense_Review.pdf.

¹¹Obama, B.H. (2011) —*Remarks by President Obama to the Australian Parliament*], available at: <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obamaaustralian-parliament>.

mengumumkan garis besar perjanjian perdagangan bebas *Trans Pacific Partnership* (TPP).¹²

Pivot to Asia adalah serangkaian kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menekankan pada pencapaian kepentingan nasionalnya, baik untuk mencapai kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi di wilayah Asia Pasifik. *Pivot to Asia* adalah kebijakan dibawah pemerintah Barack Obama yang menandai kembalinya Amerika Serikat ke wilayah Asia Pasifik. Melalui *Pivot to Asia* Amerika Serikat akan semakin mengintensifkan perannya di kawasan Asia.¹³

Di dalam *Pivot to Asia* memiliki keamanan yang signifikan dan implikasi militernya. Berbagai kerjasama militer telah diagendakan oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Obama dengan menggandeng negara-negara di kawasan Asia seperti Australia, Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam dan juga Singapura sebagai bagian dari kebijakan *Pivot to Asia*. Pada Januari 2012 panduan strategi pertahanan adalah dokumen resmi pertama dimana *pivot* ini disebutkan, panduan tersebut menyatakan bahwa “*While the U.S. military will continue to contribute to security globally, we will of necessity rebalance toward the Asia-Pacific region*”.¹⁴

Adanya lima poin mengenai kebijakan Amerika Serikat di Laut Tiongkok

1. Adanya penyelesaian sengketa secara damai
2. Menjaga perdamaian dan kestabilan kawasan
3. Menjaga kebebasan bernavigasi

¹²Vaughn, B. and Ian F. Fergusson (2011) —The Trans-Pacific Partnership Agreement, *Congressional Research Service*, available at: <http://www.fas.org/sgp/crs/row/R40502>.

¹³Evan A. Feigenbaum, *Council on foreign Relations; Strengthening the U.S. Role in Asia*, diakses dari <<http://www.cfr.org/asia/strengthening-us-role-asia/p26520>>, pada 10 Juni 2018

¹⁴DOD (2012a) —*Sustaining U.S. Leadership: Priorities for 21st Century Defense*, available at http://www.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.

4. Netralitas dalam sengketa
5. Menghargai prinsip-prinsip internasional dalam UNCLOS dimana telah ditetapkan pada tahun 1982.¹⁵

Keterlibatan Amerika Serikat dengan kawasan Asia Tenggara yang didasarkan pada keinginan untuk menciptakan wilayah yang damai, keamanan yang stabil dan sejahtera. Amerika Serikat berusaha untuk membangun kepercayaan di kawasan serta memberikan konteks bagi negara-negara untuk membangun lebih dekat dengan hubungan satu sama lain. Selain itu, Amerika Serikat ingin meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia-Pasifik, yang berkaitan erat dengan kebangkitan Tiongkok, dimana kebangkitan Tiongkok akan menimbulkan adanya konflik antara kekuatan-kekuatan besar untuk melakukan rekonsruksi pengaturan kekuatan di kawasan.¹⁶

Pada bulan Juni 2015 Amerika Serikat dan Vietnam menandatangani pernyataan visi bersama tentang hubungan pertahanan yang mempertimbangkan perdagangan pertahanan yang lebih besar, dan produksi bersama dalam peralatan militer. Barack Obama mengumumkan akan menyediakan \$18juta untuk penjaga Pantai yang digunakan untuk membeli kapal patroli Hiu Logam Amerika Serikat. Presiden Barack Obama juga mencabut larangan 30 tahun pada ekspor senjata mematikan ke Vietnam, untuk memperdalam rasa saling percaya dan normalisasi sepenuhnya.¹⁷

¹⁵ Fravel, M. T. “ *The Us and China in Regional Security: Implications for Asia and Europe*”. Makalah dalam The 6th Berlin Conference on Asian Security, 18-19 June, di Berlin, Jerman. 2012

¹⁶ Odgaard, L. “ *The Balance of Power in Asia-Pacific security: US_China Policies on Regional Order*”. New York:Routledge. 2007

¹⁷ Jordan, Willim, Lewis M.Stern, Walter Lohman, “ U.S.-Vietnam Defense Relations: Investing in Strategic Alignment. The Heritage Foundation Leadership for America, No.2907

Amerika Serikat menyebutkan bahwa kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan regional yang berpotensi dalam mempengaruhi perekonomian dan keamanan Amerika Serikat dalam berbagai cara. Amerika Serikat akan terus melakukan investasi, untuk memastikan agar akses regional dan kemampuan untuk beroperasi secara bebas serta penegakan hukum internasional tetap terjaga.¹⁸

Di Asia Tenggara, kebijakan pemerintahan Obama juga menekankan membangun “*Pivot*” atau “penyeimbangan” kembali ini di empat negara otoriter yaitu Vietnam, Laos, Kamboja, dan juga Myanmar. Dari semua negara di daratan Asia Tenggara, hanya Vietnam yang menawarkan potensi keuntungan strategis bagi Amerika Serikat untuk melangsungkan diplomasi militer. Vietnam mempunyai militer yang lebih besar, dan di dalam konflik Vietnam berpotensi jauh lebih efektif dari pada negara lain di daratan Asia Tenggara. Angkatan laut Vietnam lebih profesional dan juga terlatih. Vietnam memiliki lokasi yang tepat di sebelah Laut Tiongkok Selatan, dimana lokasinya menjadi rute pelayaran yang sangat penting, rute vital dalam perdagangan dan berada di jantung salah satu area paling berbahaya di dunia.¹⁹

1.2 Rumusan Masalah

Pada masa pemerintahan Barack Obama di tahun 2008, Obama mengeluarkan kebijakan *Pivot to Asia*. Kebijakan *Pivot* ini dikeluarkan oleh Obama untuk membantu permasalahan di Asia. Adanya enam negara yang terlibat dalam kebijakan *Pivot to Asia* ini, salah satunya termasuk Vietnam. Vietnam

¹⁸ U.S. Department of State.” *Remarks With Secretary of Defense Leon Panetta, Philippines Foreign Secretary Albert del Rosario, and Philippines Defense Secretary Voltaire Gazmin After Their Meeting*”. Diakses dari <http://www.state.gov/secretary/rm/2012/04/188982.html>. 2012

¹⁹ Joshua Kurlantzick. “The Pivot in Southeast Asia”. Working Paper. hal.14. 2015

terlibat dalam mengklaim kawasan Laut Tiongkok Selatan, yaitu kepulauan Paracel dan Sparty. Negara yang termasuk dalam pengklaiman tersebut adalah Tiongkok, dimana Tiongkok mulai meningkatkan militernya untuk memperebutkan kepulauan Paracel dan Sparty. Dengan adanya konflik tersebut ketegangan antara negara-negara yang mengklaim wilayah Laut Tiongkok Selatan. Vietnam melakukan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat menyetujui adanya kerjasama pertahanan dengan Vietnam melalui adanya MoU yang ditandatangani antara kedua negara. Pada bulan September 2011, dengan pelaksanaan MoU kedua negara menegaskan kembali komitmen untuk implentasi penuh dalam melanjutkan kesepakatan Politik, Keamanan, dan Dialog Kebijakan Pertahanan.²⁰ MoU tersebut memiliki lima prioritas dalam bidang kerjasama, yaitu: Keamanan Maritim, SAR, HADR, pertukaran antara universitas dan lembaga penelitian pertahanan dan operasi pasukan peramaian PBB. Sehingga, pentingnya untuk melihat bagaimana Amerika Serikat melakukan diplomasi pertahanan ke vietnam terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui *Pivot to Asia*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah ***Bagaimana Diplomasi Amerika Serikat ke Vietnam terkait Sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui Pivot to Asia?***

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan diplomasi Amerika Serikat ke vietnam terkait Sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui *Pivot to asia*.

²⁰ Carl, Thayer, “ Vietnam Gradually Warms Up to US Military. The Diplomat”, <http://thediplomat.com/2013/11/vietnam-gradually-warms-up-to-us-military/>, diakses pada 4 mei 2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi wawasan serta pengetahuan akademis dalam kajian ilmu Hubungan Internasional mengenai permasalahan diplomasi dalam *Pivot to Asia* yang Khususnya yang diaplikasikan oleh Amerika Serikat ke Vietnam.
2. Secara Akademis, penelitian ini dapat menambah pemahaman dalam penerapan alat analisis seperti teori dan juga konsep dalam menjelaskan fenomena hubungan Internasional khususnya studi kasus diplomasi melalui *Pivot to Asia*
3. Menjadi referensi literasi dalam kajian diplomasi khususnya permasalahan diplomasi Amerika Serikat ke Vietnam terkait Laut Tiongkok Selatan melalui *Pivot to Asia* bagi penstudi ilmu hubungan Internasional yang dapat dianalisis dan diteliti lebih lanjut bagi pihak yang tertarik dengan permasalahan ini.

1.6 Studi Pustaka

Penelitian ini telah melakukan studi pustaka dengan menganalisis beberapa penelitian terkait, berikut beberapa penelitian tersebut: Penelitian pertama yang digunakan adalah *Keterlibatan Amerika Serikat dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan pada Masa Pemerintah Presiden Barack Obama* yang ditulis oleh Arif Bakhtiar Darmawan dan Gebyar lintang Ndadari. Penelitian ini menjabarkan tentang keterlibatan Amerika Serikat dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, keterlibatan Amerika Serikat tidak lepas sejarah kehadiran Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Dilihat di dalam penelitian ini, keterlibatan Amerika Serikat disini sebagai perimbangan kekuatan (*Balance of Power*). Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai penyeimbangan *balancer* di dalam

wilayah Laut Tiongkok Selatan dikarenakan tugas sebagai penyeimbang biasanya diberikan kepada suatu negara dengan kekuatan besar yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan distribusi kekuatan. Hal tersebut berlanjut kepada Amerika Serikat memberikan bantuan keamanan dan juga melanjutkan penjualan senjata ke negara-negara dagang utama di Asia Tenggara untuk mendapatkan keuntungan, terutama dalam luar kawasan membangun kontrol atas wilayah dan memiliki tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang mana untuk kepentingan nasionalnya. Selain itu keterlibatan Amerika Serikat adalah mengamankan jalur pelayaran yang mana Amerika Serikat sangat keras untuk menegakkan hukum internasional dan menerapkan UNCLOS dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Amerika Serikat juga melakukan kerjasama dan juga Status Quo dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan yang mana kecemasan Amerika Serikat dalam adanya kebangkitan Tiongkok, hal tersebutlah yang mendorong kerjasama militer dengan Vietnam, dikarenakan kerja sama dengan Vietnam adalah strategi Amerika Serikat yang mendekati diri pada wilayah *Pivot* atau untuk melakukan *rebalance* di Asia.²¹

Penelitian kedua yang digunakan adalah *International Law in the Obama Administration's Pivot to Asia: The China Seas Dispute, The Trans-Pacific Partnership, Rivalry With the PRC, and Status Quo Legal Norms in U.S. Foreign Policy* oleh Jacques de Lisle. Penelitian ini menjabarkan tentang berkembangnya *Pivot* di Asia, Barack Obama mempertahankan *Pivot to Asia* nya di negara Asia untuk memperbaiki perekonomiannya, dengan cara melakukan kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara, salah satunya termasuk Vietnam. Amerika

²¹ Arief Bakhtiar Darmawan dan Gebyar Lintang Ndadari, "Keterlibatan Amerika Serikat dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama", Jurnal Hubungan Internasional, Vol.6, diakses pada juni 2018, hal.5-6

Serikat membantu Vietnam dalam segi keamanan dalam menghadapi kasus di Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok termasuk yang mengklaim kepulauan Laut Tiongkok Selatan, Amerika Serikat menyalahkan Tiongkok yang mengklaim kepulauan Laut Tiongkok Selatan, dikarenakan harus diberlakukannya UNCLOS. Di dalam penelitian ini banyaknya menjabarkan *Pivot* atas kebangkitan Tiongkok.²²

Penelitian ketiga yang digunakan adalah *Territorial Disputes in The South China Sea* oleh Jihyun Kim. Dalam penelitian ini menjabarkan bahwasanya di dalam kasus Laut Tiongkok Selatan Amerika Serikat yang terlibat di dalam kasus ini, Amerika Serikat cemas atas kebangkitan Tiongkok yang sangat pesat. Amerika Serikat membuat kebijakan *Pivot* di Asia, untuk menyeimbangi kekuatan Tiongkok. Amerika Serikat melakukan peningkatan militer dalam negara-negara di Asia. Amerika Serikat berfokus meningkatkan militernya agar bisa menyeimbangi kekuatan dengan Tiongkok, dan juga untuk memperbaiki perekonomiannya melalui *Pivot to Asia*. Tujuan dalam penelitian ini *Pivot* lebih berfokus kepada Tiongkok bersaing melalui peningkatan militer.

Penelitian ke empat digunakan adalah *The Pivot in Southeast Asia, Balancing interest and Values* oleh Joshua Kurlantzick di dalam penelitian ini menjabarkan tentang tujuannya terbentuk *Pivot to Asia* yang mana untuk menyeimbangi perekonomian Amerika Serikat. Amerika Serikat memperluas diplomatik, ekonomi dan hubungan kerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara yaitu Singapura, Indonesia, Filipina dan juga Vietnam. Di dalam penelitian ini Barack Obama memfokuskan tujuan utamanya adalah Asia

²² Mark E. Manyin, “Pivot to Pacific? The Obama Administration’s “Rebalancing” Toward Asia, diakses pada Juni 2018, No.0704, hal 3-5

Tenggara. di Asia Tenggara, kebijakan pemerintahan Obama menekankan membangun atau membangun kembali hubungan dengan empat negara otoriter dari daratan yaitu Vietnam, Laos, Kamboja dan juga Myanmar. Salah satu negara yaitu Vietnam, adalah salah satu berhasilnya *Pivot*, kedua negara ini bukan hanya menjalin hubungan diplomatik, akan tetapi mereka juga menjalin hubungan yang lebih kuat lagi dalam hubungan keamanan. Amerika Serikat melakukan pengiriman militer kepada Vietnam dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Akan tetapi Vietnam bukanlah tujuan utama Amerika Serikat, dikarenakan banyaknya negara yang tergabung di dalam *Pivot to Asia*.²³

Penelitian ke lima yang di gunakan adalah *Rebalance To Asia and The Pacific: Leveraging Vietnam to Counterbalance China* oleh Gary Dettloff. Penelitian ini menguji pergeseran startegis Amerika Serikat ke Pasifik, Amerika Serikat memanfaatkan Vietnam sebagai tindakannya untuk “penyeimbangan”. Amerika Serikat membantu Vietnam untuk menjaga keseimbangan militer di Asia dan pasifik. Munculnya “penyeimbangan” atau *Pivot* ini, dikarenakan munculnya Tiongkok. Amerika Serikat membuat *Pivot* yang berfokus ke Asia untuk meningkatkan militer, maupun ekonominya dari Tiongkok. Amerika Serikat memilih Vietnam dikarenakan Vietnam adalah satu-satunya yang memiliki perbatasan tanah bersama Tiongkok yang bisa dieksploitasi. Dikarenakan hal itulah Amerika Serikat perlu untuk meningkatkan militer kepada Vietnam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyeimbangi kekuatan Tiongkok.²⁴

²³Joshua Kurlantzick ,“*The Pivot in Southeast Asia, Balancing interest and Values*”, Vol,26, Hal.12

²⁴Gary Dettloff, “ *Rebalance To Asia and The Pacific: Leveraging Vietnam to Counterbalance China*” Vol,17, hal 5

Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan lima tulisan terkait. Tulisan pertama menjelaskan keterlibatan Amerika Serikat di dalam Laut Tiongkok Selatan, walaupun banyaknya di dalam penelitian ini keterlibatan Amerika Serikat akan tetapi Amerika Serikat tidak mengurangi ketegangan antara Vietnam dan Tiongkok dalam kasus Laut Tiongkok ini. Amerika Serikat membantu Vietnam untuk melawan Tiongkok dalam kasus Laut Tiongkok Selatan. Penelitian kedua dan ketiga menjabarkan, munculnya *Pivot To Asia* ini dikarenakan munculnya Tiongkok, dimana Tiongkok adalah negara yang sedang berkembang pesat, terutama dalam hal ekonomi. Amerika Serikat melakukan *Pivot to Asia* untuk menstabilkan kembali perekonomiannya, dengan membuat kerjasama dengan negara-negara di Asia. Di dalam penelitian ini kurangnya adanya upaya Amerika Serikat terhadap Vietnam.

Penelitian ke empat, Amerika Serikat tujuan berjalannya *Pivot* bukan hanya Vietnam saja, melainkan banyaknya negara yang ingin dituju oleh Amerika Serikat, disini juga tidak dijelaskan bagaimana diplomasi yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat ke Vietnam. Terakhir, penelitian ini membantu Vietnam dalam kasus Laut Tiongkok Selatan untuk kepentingan nasionalnya, Amerika Serikat menggunakan *Pivot* untuk mendapatkan kepentingannya.

Perbedaan antara lima studi pustaka diatas dengan penelitian ini adalah, dimana *Pivot to Asia* di jadikan alat utama untuk meningkatkan perekonomian Amerika Serikat Sendiri. Bentuk upaya yang dilakukan oleh kelima peneliti ini belum menjadi tujuan utamanya untuk membantu Vietnam dalam Laut Tiongkok Selatan. Oleh karena itu, peneliti ini akan melihat bagaimana diplomasi Amerika

Serikat ke Vietnam terkait Laut Tiongkok Selatan melalui *Pivot to Asia* secara spesifik melalui konsep diplomasi pertahanan beserta 3 indikatornya.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Diplomasi Pertahanan

Kerangka Konseptual yang digunakan untuk memahami penelitian ini adalah diplomasi pertahanan. Diplomasi Pertahanan ini yang terletak pada diplomasi militer klasik yang ada sejak zaman kuno dan dihidupkan kembali di era Napoleon. Adanya Evolusi, hingga akhir Perang Dingin, dimana tidak adanya perubahan besar yang berfokus pada Militer. Pada tahun 1990 munculnya era baru dalam dunia internasional, adanya interdependensi yang kompleks yang meningkat aktor-aktor baru di dunia global, serta juga munculnya diplomasi publik, yang mana semuanya memberi ruang bagi konsep baru diplomasi pertahanan ini.²⁵

Diplomasi Pertahanan pertama kali dicetuskan dalam SDR (*Strategic Defence Review*) oleh Kementerian Pertahanan Inggris tahun 1998. *Strategic Defence Review* ini menyatakan secara jelas bahwa diplomasi pertahanan adalah tugas baru pertahanan. Hal ini disebabkan oleh munculnya konsep yang memang baru pada saat itu yang akan merubah fungsi tradisional dari angkatan bersenjata, yang sebelumnya digunakan untuk mencapai sesuatu secara paksa, menjadi kesatuan yang bekerja bersama infrastruktur terkait (Kementerian Pertahanan) untuk membangun kerjasama dengan negara lain dan mendukung negara lain untuk memperbaharui pertahanannya.²⁶

²⁵Andrew F. Cooper, Jorge Heine, and Ramesh Thakur: *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy* (United Kingdom:2013)

²⁶Andrew Cottey dan Anthony Forster, "*Chapter I: Strategic Engagement: Defence Diplomacy as a Means of Conflict Prevention*", dalam *Adelphi Papers*, (2004), 44:365, New York: Routledge., hal. 6

Cottey dan Foster menyatakan bahwa perubahan besar diplomasi pertahanan pada awal 1990-an adalah pola penggunaannya. Awalnya diplomasi pertahanan ini digunakan untuk memperkuat dan meningkatkan kapabilitas pertahanan negara yang bersekutu, kemudian diplomasi pertahanan digunakan sebagai instrumen yang mengupayakan kompromi dengan negara-negara musuh atau yang berpotensi menjadi musuh untuk mencegah konflik.²⁷ Cottey dan Foster kemudian menyatakan bahwa penggunaan diplomasi pertahanan dengan maksud mencegah konflik secara operasional berjalan dalam banyak cara yaitu²⁸:

1. Diplomasi Pertahanan sebagai upaya membangun persepsi akan kepentingan bersama, dengan cara mengangkat satu isu yang patut mendapat perhatian bersama kepermukaan
2. Kerjasama militer sebagai bentuk transparansi dalam hubungan pertahanan, menggunakan doktrin pertahanan (biasanya defence white paper) sebagai tool dalam diplomasi pertahanan, sehingga negara lain membaca produk tersebut dan mengetahui arah dari perkembangan militer suatu negara.
3. Kerjasama militer dapat melakukan peran politis sebagai simbol kemauan untuk melebarkan ruang lingkup kerjasama, saling percaya dan komitmen untuk menyiasati perbedaan

Diplomasi pertahanan mendorong kerjasama antara negara-negara dengan menggunakan instrumen pertahanan dan institusi yang mengelolanya, yakni Kementerian pertahanan. Diplomasi pertahanan dijalankan dalam rangka

²⁷Andrew Cottey dan Anthony Forster, "Chapter I: Strategic Engagement: Defence Diplomacy as a Means of Conflict Prevention, hal. 15

²⁸Andrew Cottey dan Anthony Forster, "Chapter I: Strategic Engagement: Defence Diplomacy as a Means of Conflict Prevention, hal. 16-17

membangun saling percaya dan membantu mengembangkan kekuatan angkatan bersenjata yang memiliki akuntabilitas dalam pemerintahan yang demokratis.

Diplomasi pertahanan ini digambarkan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh kementerian pertahanan untuk menghilangkan permusuhan, dan upaya-upaya membangun dan menjaga kepercayaan (*confidence building measures*), dan juga membantu mengembangkan akuntabilitas dalam lingkungan angkatan bersenjata.²⁹

Adanya aktivitas diplomasi pertahanan yang diselenggarakan negara memiliki tiga varian yaitu³⁰:

1. *Defence diplomacy for confidence building measures*
2. *Defence diplomacy for defence capabilities*
3. *Defence diplomacy for defence industries*

1.7.1.1 *Defence diplomacy for confidence building measures*

Diplomasi pertahanan jenis ini dilakukan untuk menurunkan adanya ketegangan didalam hubungan negara yang terjadi akibat mispersepsi akan arah kebijakan pertahanan. Diplomasi pertahanan dalam konteks *confidence building* mengajak negara mitra untuk saling terbuka atau transparan dalam kebijakan dan juga pengembangan kapabilitas militernya.

Penyelenggaraan dan peningkatan hubungan diplomasi di dalam *confidence building* akan menimbulkan kondisi moral yang baik di dalam hubungan antar negara, sehingga menciptakan ranah saling mempercayai satu pihak dengan pihak lainnya. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas kerjasama

²⁹UK Ministry of Defence 1999, hal. 178

³⁰Justin Fris, Thesis: "Neither Staunch Friends Nor Confirmed Foes : New Zealand's Defence Diplomacy in Asia" (2013), Victoria University of Wellington., Hal. 7

pertahanan yang dikategorikan sebagai diplomasi pertahanan dalam konteks *confidence building measures*:³¹

1. Kunjungan Kenegaraan
2. Deklarasi Kerjasama Strategis
3. Pertukaran Perwira
4. Pendidikan Militer
5. Kesepakatan Hubungan baik
6. Latihan Operasi Militer secara bersama

1.7.1.2 *Defence diplomacy for defence capabilities*

Penyelenggaraan *diplomacy for defence capabilities* ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan negara secara material. Instrumen diplomasi dalam hal ini berperan penting dalam upaya pelibatan faktor eksternal seperti pembelian alutsista dalam rangka peningkatan kekuatan pertahanan suatu negara dari negara mitra. Penyelenggaraan diplomasi ini semata-mata berdasarkan pertimbangan kesiapan pertahanan negara untuk menghadapi ancaman potensial melalui peningkatan kapabilitas militer. Secara praktis kegiatan-kegiatan diplomasi ini dapat seperti:³²

1. Kerjasama dalam bantuan militer
2. Pembangunan basis Konsentrasi Militer
3. Jaminan Keamanan yang bersifat timbal balik

³¹ Justin Fris, Thesis: Neither Staunch Friends Nor Confirmed Foes, hal. 17

³² Justin Fris, Thesis: Neither Staunch Friends Nor Confirmed Foes, hal. 19

1.7.1.3 *Defence diplomacy for defence industry*

Defence diplomacy for defence industry ini dilakukan melalui bantuan pembangunan dan pemutakhiran industri domestik di bidang pertahanan suatu negara. Perkembangan industri pertahanan suatu negara akan mengurangi dampak ketergantungan politik dan ekonomi dalam hal pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dalam rangka peningkatan kapabilitas militer. Selain itu juga, akan memberikan peluang keuntungan ekonomis bagi negara mitra. Aktivitas-aktivitas yang digolongkan sebagai bentuk pelaksanaan diplomasi ini adalah:³³

1. Kerjasama strategis antar negara dalam produksi senjata
2. Kerjasama strategis antar negara dalam riset pengembangan senjata
3. Investasi dalam insdustri pertahanan

Dapat dilihat bahwasanya *Pivot to Asia* yang merupakan diplomasi Pertahanan yang di jalankan oleh Amerika Serikat karena seluruh kegiatan diplomatik yang berkaitan dengan keamanan nasional dan kegiatan militer. Adanya pertukaran aktor pertahanan dalam rangka melakukan pelatihan bersama dengan aktor pertahanan dari negara-negara lain yang bertujuan untuk memperkuat *Confidence building measures* dan memperkuat stabilitas kawasan.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi dalam sebuah penelitian ilmu Hubungan Internasional digunakan sebagai prosedur bagaimana pengetahuan tentang sebuah fenomena hubungan internasional tersebut diperoleh. Selain itu, metode penelitian juga membantu penulis untuk melakukan penelitian secara sistematis dan konsisten,

³³Iis Gindarsah (2015). Working Paper: “*Indonesia’s Defence Diplomacy: Harnessing The Hedging Strategy Against Regional Uncertainties*”, Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies., hal. 24

sehingga nantinya akan didapatkan data dan hasil penelitian yang baik seperti yang diharapkan.

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.³⁴ Adapun Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna dari data yang telah kita dapatkan.³⁵ Dengan menggunakan metode penulisan deskriptif, penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana bentuk diplomasi pertahanan Amerika Serikat ke Vietnam terkait Sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui *Pivot to Asia*. Penggunaan metode penulisan deskriptif ditujukan agar dapat menggambarkan dan menyampaikan masalah yang diteliti secara cermat dan lengkap.

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan waktu yang digunakan untuk menjabarkan upaya Amerika Serikat ke Vietnam terkait Laut Tiongkok Selatan melalui *Pivot to Asia* adalah dari tahun 2011 sebagaimana upaya yang dilakukan Amerika Serikat dimulai dari kasus di Laut Tiongkok Selatan dimulai ditahun 2011, dimana pada saat itu Barack Obama memimpin, dan mengeluarkan kebijakan *Pivot to Asia*, sampai tahun 2016.

³⁴ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches* 4th Edition, (California, SAGE Publications:2013), hal.4

³⁵ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches*, Hal. 4-5

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis adalah objek yang perilakunya akan dideskripsikan.³⁶ Variabel independen adalah bagian dari unit analisis yang akan dijabarkan.³⁷ Sedangkan unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisis yang akan digunakan.³⁸ Tingkat analisis adalah hal yang menjadi landasan dalam keberlakuan suatu pengetahuan.

Berdasarkan penjelasan diatas, unit analisa dalam penelitian ini adalah Amerika Serikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah diplomasi pertahanan Amerika Serikat. Sedangkan unit eksplanasinya adalah Vietnam. Disamping itu yang menjadi tingkat analisisnya adalah negara, Karena Amerika Serikat melakukan diplomasi pertahanan ke Vietnam.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

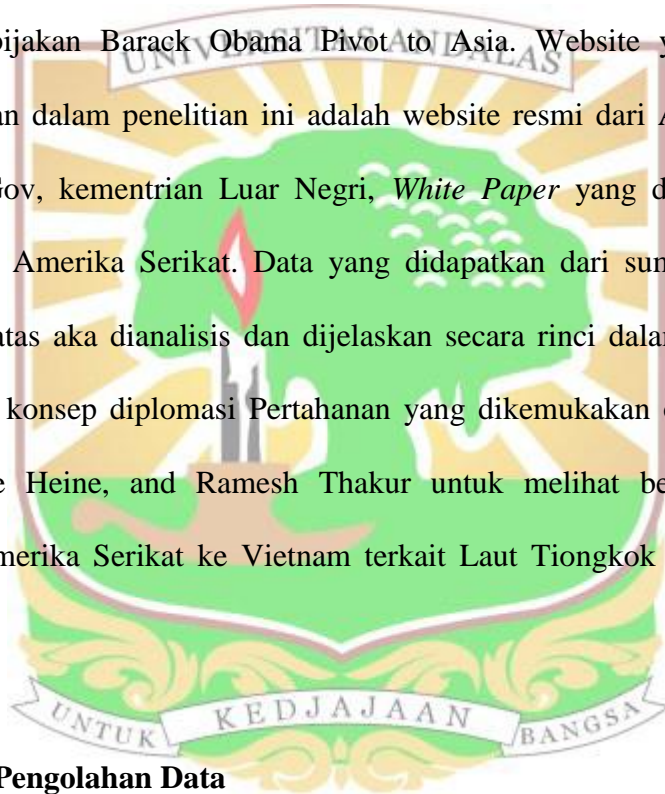
Penelitian kali ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan studi pustaka atau Library Research dimana penelitian yang menggunakan pendekatan ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder atau referensi ilmiah yang telah ada, data tersebut khususnya membahas bentuk diplomasi Amerika Serikat yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat ke Vietnam terkait Sengketa di Laut Tiongkok Selatan, serta bentuk upaya yang telah dilakukan yang dihadirkan ke dalam bentuk referensi seperti artikel jurnal yang berjudul . *American Foreign Policy in Regions of Conflict* Terdapat juga beberapa buku yang dijadikan referensi dalam penelitian ini. Pertama, *U.S-Vietnam Defence Relations: Investing in Strategic Alignment* yang ditulis oleh Wiarda,

³⁶Mochtar Mas'oed, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, (Jakarta:LP3ES,1994), hal.35

³⁷ Mochtar Mas'oed, Ilmu Hubungan Internasional disiplin dan Metodologi, hal.36

³⁸ Mochtar Mas'oed, Ilmu Hubungan Internasional disiplin dan Metodologi, hal.37

H.J yang digunakan untuk menganalisis bentuk dari diplomasi antara Amerika ke Vietnam terkait Sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Kedua, *Strategic Engagement: Defence Diplomacy as a Means of Conflict Prevention* yang ditulis oleh Andrew Cottey dan Antony Forster, yang digunakan untuk melihat strategi dari diplomasi Pertahanan. Ketiga, *The Oxford of Modern Diplomacy* yang dijadikan sebagai referensi diplomasi pertahanan, dan aktivitas di dalamnya. Terdapat juga dokumen resmi dari *Whitehouse gov* yang dijadikan referensi mengenai kebijakan Barack Obama *Pivot to Asia*. Website yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah website resmi dari Amerika Serikat yaitu, USA Gov, kementerian Luar Negri, *White Paper* yang di dapatkan dari website resmi Amerika Serikat. Data yang didapatkan dari sumber yang telah disebutkan diatas aka dianalisis dan dijelaskan secara rinci dalam penelitian ini menggunakan konsep diplomasi Pertahanan yang dikemukakan oleh Andrew F. Cooper, Jorge Heine, and Ramesh Thakur untuk melihat bentuk diplomasi pertahanan Amerika Serikat ke Vietnam terkait Laut Tiongkok Selatan melalui *Pivot to Asia*.



1.8.5 Teknik Pengolahan Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan penelusuran data – data yang telah didapatkan secara mendalam. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data, yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan. Di dalam penelitian ini, data- data yang telah dikumpulkan

akan dipilah-pilah dan diinterpretasikan sehingga mendapatkan sumber-sumber relevan yang dapat menjelaskan isu yang dibahas dalam penelitian ini.³⁹



³⁹Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research*, (California: SAGE Publications Inc, 1999), hal. 150.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Sengketa Laut Tiongkok Selatan dan kaitannya antara Amerika Serikat dan Vietnam

Bab ini menjelaskan kaitan antara Amerika Serikat dan Vietnam terkait di Laut Tiongkok Selatan, dan juga ketertarikan Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan.

BAB III: *Pivot To Asia* sebagai Kebijakan Amerika Serikat terkait Laut Tiongkok Selatan

Bab ini menjelaskan apa itu *Pivot To Asia*, dan untuk apa kaitannya dengan sengketa Laut Tiongkok Selatan.

BAB IV : Analisis Diplomasi Amerika Serikat ke Vietnam terkait Laut Tiongkok Selatan melalui *Pivot To Asia*

Bab ini berisi analisis penulis dalam bagaimana yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat ke Vietnam terkait Laut Tiongkok Selatan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti ini